

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN**



**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH**

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

TIM PENGUSUL:

**Juita Sukraini, SE. M.Si / 1017116201/Ketua
Siska Yulia Defitri, SE. M.Si/ 1023078301/ Anggota**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK
FEBRUARI 2021**

HALAMAN PENGESAHAN

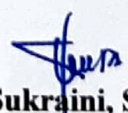
Judul : Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem
Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Daerah

Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : Juita Sukraini, SE. M.Si
NIDN : 1017116201
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Nomor HP : 081374654590
Alamat surel (e-mail) : jjuitasukraini@gmail.com
Anggota Tim
Nama Lengkap : Siska Yulia Defitri, SE. M.Si
NIDN : 1023078301
Perguruan Tinggi : Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
Tahun Pelaksanaan : 2020/2021
Sumber Dana : Mandiri
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 7.500.000,-
Biaya Keseluruhan : Rp. 7.500.000,-

Solok, 23 Februari 2021


Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi
(Juita Sukraini, SE. M. Si)
NIDN. 1017116201

Ketua,


(Juita Sukraini, SE. M. Si)
NIDN. 1017116201

Menyetujui,
Kepala LP3M UMMY


(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM)
NIDN. 1019017402

DAFTAR ISI

RINGKASAN.....	1
1. PENDAHULUAN.....	1
2. KAJIAN PUSTAKA.....	4
3. METODE.....	9
4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	16
5. PENUTUP	28
6. DAFTAR PUSTAKA	29
LAMPIRAN	

PENGARUH SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

RINGKASAN

Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintah yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju sesuatu tatanan pemerintah yang demokratis penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel akan mendapatkan dukungan dari publik dipihak penyelenggara akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik. Menguatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menyebabkan seluruh instansi pemerintah menyusun perencanaan strategik, melakukan pengukuran kinerja dan melaporkannya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui : (1) Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (3) Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Populasi dalam penelitian ini adalah 26 Organisasi Pemerintah Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Solok. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *total sampling*. Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (3) Sistem Pelaporan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kata Kunci : *Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang – Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang No. 33 tahun 2004 sebagai pengganti Undang – Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi Daerah merupakan upaya

pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Dengan adanya otonomi daerah pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah sendiri. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan sistem akuntansi yang baik karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang *accountable* dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintah yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju sesuatu tatanan pemerintah yang demokratis penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel akan mendapatkan dukungan dari publik dipihak penyelenggara akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik. Menguatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menyebabkan seluruh instansi pemerintah menyusun perencanaan strategis, melakukan pengukuran kinerja dan melaporkannya.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat berperan dalam pengukuran dan meningkatkan kinerja pemerintah selain itu penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga berdampak pada penyusunan anggaran yang berdasarkan kinerja. Fenomena didalam penelitian ini yaitu Pemerintahan Kabupaten Solok telah melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir

Pada dasarnya Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah disusun agar para petugas yang menjalankan fungsi dari akuntansi untuk dapat menjalankan proses akuntansi secara baik dan benar, apabila didalam penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dilakukan secara benar dalam menyajikan laporan keuangan maka pertanggungjawaban atas laporan keuangan akan menjadi baik sesuai yang telah ditentukan secara tidak lansuang juga berpengaruh terhadap laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai mana penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Afrina, 2015; Aprianti, 2017; Fathia, 2017; Lumenta et al., 2016; Syahrir, 2019; Zulharman, 2015) dengan hasil bahwa penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sangat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Soleman et al., 2019) menyatakan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu untuk mencapai kinerja yang berakuntabilitas pemerintah menerapkan Sistem Pengendalian Internal. Sistem Pengendalian Internal pada pemerintahan pusat dan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Internal. Sistem pengendalian internal yang efektif dalam suatu pemerintahan yang akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik sehingga akan dapat memberikan keyakinan yang

memadai bagi terciptanya pengamanan asset Negara dan keandalan sebuah laporan keuangan daerah, dalam hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian yang di lakukan oleh (Afrina, 2015; Aprianti, 2017; Fitriyani & Herawati. Helmi, 2014; Kadek et al., 2014; Kahar et al., 2017; Soleman et al., 2019; Syahrir, 2019) bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat di peroleh dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
3. Apakah Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah Daerah.
4. Apakah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
4. Untuk Mengetahui Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu semoga bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan diantaranya:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan bagi pemeritan Kabupaten Solok kedepannya.

3. Penelitian ini di harapkan bisa menjadi referensi dan dapat digunakan sebagai dasar pemikiran khususnya yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut dibidang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah di berikan dan dikuasai untuk mencapai sasaran dan tujuan melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik (Afrina, 2015).

Akuntabilitas merupakan konsep pertanggung jawaban atas tindakan individual atau organisasi yang telah di amanatkan. Mengacu pada teori agensi (Pratama et al., 2019) menyatakan bahwa akuntabilitas publik dapat di maknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan menggunakan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

2.2 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Adanya UU Nomor 32 Tahun 2004 yang di gantikan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Akan tetapi selain mempunyai kewenangan, pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber dayanya tersebut. Oleh karena itulah sistem akuntansi menjadi suatu tuntutan sekaligus kebutuhan bagi tiap pmda.

Akuntansi pemerintahan adalah salah satu percabangan akuntansi, selain akuntansi sosial yang mencatat perhitungan makro Negara dan akuntansi komersial yang digunakan oleh perusahaan dalam mengelola akuntansi bisnisnya. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan RI

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah sebuah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, pengelolaan penafsiran, peringkasan, transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD (Rasdianto, 2013). Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebuah proses pengidentifikasian pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi Ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang memerlukan (Halim & Kusufi, 2012).

2.3 Sistem Pengendalian Internal

Setiap organisasi termasuk pemerintah memerlukan suatu alat pengendalian untuk menjamin bahwa aktivitas organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sistem Pengendalian Internal diterapkan untuk mencapai tujuan dan meminimalkan hal-hal yang terjadi di luar neraca, meningkatkan efisiensi, mencegah timbulnya kerugian atas aktiva, meningkatkan kehandalan data dalam laporan keuangan dan mendorong dipatuhinya hukum dan aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu sistem pengendalian internal memiliki kedudukan yang sangat penting.

Pengendalian internal merupakan salah satu fungsi manajemen. Penerapan sistem pengendalian internal harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan, dengan demikian melalui penerapan sistem pengendalian internal dapat diperoleh informasi mengenai kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan oleh pemimpin.

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2017). Sedangkan menurut (IAPI, 2011) sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian dalam kendali pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Rencana organisasi dan metode yang di gunakan untuk menjaga atau melindungi aktivitas dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat di percaya (Krismiaji, 2010).

2.4 Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran) (Hidayatullah, 2013). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam

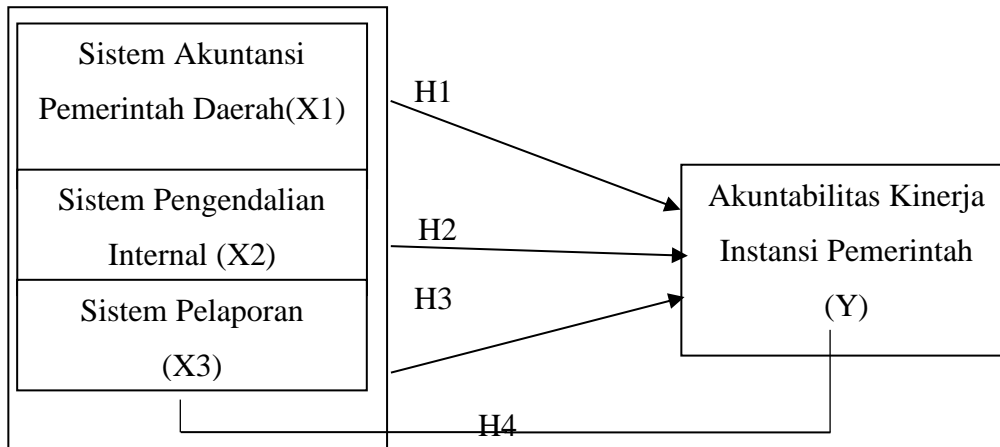
mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Afrina, 2015). Sistem pelaporan adalah laporan anggaran yang merinci macam-macam prestasi dari anggaran berdasarkan faktor yang menjadi penyebab anggaran itu sendiri dan unit organisasi yang bertanggung jawab atas anggaran tersebut (Pratama et al., 2019)

Dari uraian tentang variabel sistem pelaporan yang telah penulis sampaikan, maka terdapat lima pertanyaan yang di dalam nya memuat indikator menurut (Agustin, 2018) yaitu:

1. Penyajian laporan keuangan secara lengkap
Suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.
2. Informasi dalam laporan keuangan digunakan sebagai alat koreksi
Informasi akuntansi yang menggambarkan tentang posisi keuangan perusahaan serta hasil usaha perusahaan pada periode yang berakhir pada tanggal tertentu, yang terdiri atas neraca, daftar laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi
3. Informasi keuangan disajikan untuk memenuhi kebutuhan umum bukan kebutuhan khusus
Maksudnya informasi laporan keuangan ini tidak hanya bisa di akses oleh pihak internal tapi juga bias bisa di akses oleh masyarakat luas atau pihak external.
4. Laporan keuangan dapat diuji dan informasi keuangan dapat dipahami oleh pengguna
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan **dapat dipahami** oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
5. Dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika **dapat dibandingkan** dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

2.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini menjelaskan bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan dengan variabel penelitian yang ingin di teliti dan merupakan tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis. Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan teoritis yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian membuat kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1
Karangka Konseptual

Berdasarkan kerangka teoritis yang diilustrasikan pada gambar 2.1 dapat diuraikan bahwa dasar pemikiran dalam penelitian ini adalah menguji apakah sistem akuntansi pemerintah daerah, sistem pengembalian internal dan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

2.6 Hipotesis Penelitian

2.6.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah dan kebijakan akuntansi. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari proses identifikasi transaksi keuangan, menjurnal ke dalam buku jurnal, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, menyusun kertas kerja konsolidasian, dan diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dikatakan sebagai sebuah pedoman dan menjelaskan siapa yang harus melakukan tugas tersebut dan menegaskan tentang transaksi apa saja yang dicatat dan bagaimana mencatatnya. Pada prinsipnya, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah disusun agar

para petugas yang menjalankan fungsi akuntansi dapat memahami dan menjalankan proses akuntansi dengan baik dan benar.

Hal ini di buktikan dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh (Afrina, 2015) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Hal ini membuktikan bahwa semakin baiknya sistem akuntansi yang diterapkan maka akan semakin baik juga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pekanbaru. Pada penelitian (Lumenta et al., 2016; Zulharman, 2015) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Hal ini membuktikan bahwa ketika sistem akuntansi pemerintah daerah diterapkan dengan baik pada masing-masing instansi pemerintah semakin baik maka akuntabilitas kinerja pada pemerintahan akan semakin meningkat. Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh (Soleman et al., 2019) menyatakan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis: H1: Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

2.6.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Sistem Pengendalian Internal yang baik dalam suatu organisasi atau di dalam sebuah instansi pemerintah sebuah daerah akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik pula, sehingga nantinya akan memberikan suatu keyakinan bagi organisasi bahwa aktivitas yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, dan hal tersebut memberikan dampak positif bagi kinerja organisasi tersebut. Untuk memperbaiki kinerja sebuah pemerintah perlu diciptakan sebuah sistem yaitu sistem pengendalian internal pemerintah agar instansi pemerintah dapat mengetahui dana publik yang digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pada penelitian yang di lakukan oleh (Aprianti, 2017) pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan baiknya penerapan Pengendalian Internal di dalam instansi pemerintah dapat membantu manajemen instansi pemerintah dalam mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik yang efektif. Sedangkan pada penelitian (Kadek et al., 2014) pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa pengendalian internal yang berjalan dengan baik dan efektif dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban didalam pengelolaan dana instansi pemerintah, kabupaten klungkung di tuntut untuk menerapkan suatu

pengendalian yang efektif dan efisien. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H2: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

2.6.3 Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan. Sistem pelaporan harus dilakukan sesuai dengan standar pelaporan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan persyaratan pelaporan keuangan organisasi sektor publik. Semakin jujur, objektif dan transparan dalam menyusun laporan keuangan dan melaporkan segala aktivitas kepada publik, hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan *stakeholder* terhadap instansi tersebut dan akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi.

Pada penelitian (Fauzan, 2017) Sistem pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Hal ini membuktikan bahwa sistem pelaporan yang baik yang mampu menyajikan informasi secara transparan dan akuntabel mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil pemerintah daerah dalam satu periode. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan (Fathia, 2017) Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah yang menerapkan sistem pelaporan yang baik dalam menjalankan permasalahan akan mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Dengan adanya sistem pelaporan dengan pertanggungjawaban yang baik akan memberikan informasi yang handal, sehingga kinerja instansi dapat dimonitor dengan baik. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan, 2013) bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H3 : Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Menurut (Sugiyono, 2014:55) penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau

lebih. Hubungan kausal merupakan hubungan yang bersifat sebab-akibat, salah satu variabel (independen) mempengaruhi variabel yang lain (dependen). Penelitian ini menguji hipotesis yang ditetapkan dan untuk mencari pengaruh antara variabel Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

3.2 Sumber dan Jenis Data

Jenis dan sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama atau sumber asli (langsung dari informan), misalnya individu atau perorangan. Sedangkan sumber data berasal dari hasil yang di peroleh dari pengisian kuesioner yang telah di berikan ke setiap Organisasi Pemerintah daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Solok.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah survei dengan menyebarkan kuesioner kepada Kepala OPD, Kasubag Perencanaan, Kasubag Keuangan dan Pengelola Keuangan di setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Solok kuesioner atau angket. Menurut (Sugiyono, 2014:225) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Jenis kuesioner yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup yaitu dimana setiap pertanyaan akan disertai dengan pilihan jawaban yang nantinya akan disebarakan kepada responden yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya (Sugiyono, 2014: 117). Populasi dalam penelitian ini adalah 26 Organisasi Pemerintah Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Solok.

Sampel menurut (Sugiyono, 2014:118) merupakan jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *total sampling*. *Total sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi (Sugiyono, 2014:124). Alasan mengambil *total sampling* karena jumlah populasi yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas atau Sekretaris, Kasubag Perencanaan, Kasubag Keuangan dan Pengelola Keuangan lingkup kerja Pemerintahan Kabupaten Solok tahun 2021.

3.5 Pengukuran Variabel

Defenisi operasional dari variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Variabel, Defenisi Operasional, Indikator dan Skala

NO	Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala
1	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(Y)	Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah di berikan dan dikuasai untuk mencapai sasaran dan tujuan melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. (Aprianti, 2017)	1. Pengukuran Kinerja 2. Penerapan Perencanaan Strategik 3. Laporan Kinerja 4. Pemanfaatan Informasi Kinerja (Aprianti, 2017)	Likert
2	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1)	Sebuah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, pengelolaan penafsiran, peringkasan, transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) (Aprianti, 2017)	1. Pencatatan 2. Penggolongan 3. Pelaporan (Aprianti, 2017)	Likert
3	Sistem Pengendalian Internal (X2)	Suatu perencanaan untuk mengarahkan, mengawasi dan sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (<i>fraud</i>) dan melindungi sumber organisasi baik yang berwujud maupun tidak. (Hasanah & Fauzi, 2016)	1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi Akuntansi 5. Pemantauan. (Hasanah & Fauzi, 2016)	Likert

4	Sistem Pelaporan (X3)	Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Agustin, 2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian laporan keuangan secara lengkap 2. Informasi dalam laporan keuangan digunakan sebagai alat koreksi, 3. Informasi keuangan disajikan untuk memenuhi kebutuhan umum bukan kebutuhan khusus 4. Laporan keuangan dapat diuji dan informasi keuangan dapat dipahami oleh pengguna 5. Dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya (Agustin, 2018) 	Likert
---	-----------------------	---	--	--------

3.6 Teknik Analisis Data

Agar suatu data yang dikumpulkan dapat bermanfaat maka harus diolah dan dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Tujuan teknik analisis data untuk menginterpretasikan dan menarik kesimpulan dari sejumlah yang terkumpul. Pengolahan dalam penelitian ini menggunakan program *SPPS 23 for windows*.

3.6.1 Uji Instrumen Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan memberikan serentetan soal atau tugas serta alat lainnya kepada subjek yang diperlukan datanya. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik tes dapat disebut sebagai pengukuran (*measurement*). Banyak penelitian yang menggunakan kuisioner sebagai skala pengukuran variabel penelitian. Kriteria kuesioner yang baik salah satunya memenuhi validitas dan reabilitas.

1. Uji Validitas

Menurut (Priyatno, 2014:51) uji validitas digunakan untuk mengukur seberapa cermat sebuah pernyataan dalam kuesioner yang akan ditanyakan kepada responden. Pengujian validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor item instrumen dengan skor total. Nilai koefisien korelasi antara skor

setiap item dengan skor total dihitung dengan analisis *corrected itemtotal correlation* dengan membandingkan r_{hitung} (kolom *Corrected Item-Total Correlation*) dengan r_{tabel} (kolom *Product Moment*) dengan signifikan 0,05 atau 5% untuk *degree of freedom (df)*=n-2, dimana n adalah jumlah responden penelitian. Suatu instrumen penelitian dikatakan valid apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Bila $|r_{hitung}| > r_{tabel}$, maka pengujian dinyatakan valid
- b. Bila $|r_{hitung}| < r_{tabel}$, maka pengujian dinyatakan tidak valid

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel. (Sugiyono, 2014:121) menyatakan bahwa instrument yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode *Cronbach's Alpha*. Untuk menginterpretasikan koefisien reliabilitas digunakan kategori menurut (Sugiyono, 2014:134) sebagai berikut :

- a. Jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,6$ maka suatu variabel dikatakan reliabel.
- b. Jika nilai *Cronbach's Alpha* $< 0,6$ maka suatu variabel dikatakan tidak reliabel.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan untuk menguji kualitas data sehingga data diketahui keabsahannya dan menghindari terjadinya estimasi bias. Pengujian asumsi klasik ini menggunakan tiga uji, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah masing –masing variabel terdistribusi secara normal atau tidak. Mode regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal yang akan disajikan dalam grafik P-Plot. Dimana standar pengambilan keputusan menurut (Ghozali, 2011:160) yaitu :

Dasar pengambilan keputusan:

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas menurut (Ghozali, 2011:105) bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas (*independent*), model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Uji multikolinieritas ini dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai *tolerance* di atas ($>$) 0,1 dan nilai VIF di bawah ($<$) 10.

- a. Jika nilai *tolerance* $>$ 0,1 dan nilai VIF $<$ 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.
- b. Jika nilai *tolerance* $<$ 0,1 dan nilai VIF $>$ 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Wiyono, 2011:160) uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dalam residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Model regresi yang baik adalah ketika tidak terjadi heteroskedastisitas.

Adapun pedoman yang digunakan untuk memprediksi atau mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas tersebut dilakukan dengan cara melihat pola gambar *scatterplots*

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut (Sugiyono, 2014:277) Analisis regresi linear berganda yaitu alat statistik digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan yang dipergunakan untuk mengetahui antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Variabel yang mempengaruhi sering disebut variabel bebas, variabel independen atau variabel penjelas. Variabel yang dipengaruhi sering disebut dengan variabel terikat atau variabel dependen. Bentuk Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini yaitu:

Persamaan :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = AKIP

a = Koefisien Konstanta

X1 = Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

X2 = Sistem Pengendalian Internal

X3 = Sistem Pelaporan

b = Koefisien Regresi

e = Koefisien error (Variabel pengganggu)

3.6.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel independent kepada variabel dependen. Dengan

pengujian hipotesis ini, peneliti menetapkan dengan menggunakan uji signifikan, dengan penetapan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternative (H_a).

1. Uji t

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan. (Ghozali, 2018;98)mengatakan bahwa uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kriterianya dikutip dari(Silalahi Ulber,2015: 559)adalah :

- a. Jika $|t_{hitung}| \geq t_{tabel}$ maka disimpulkan bahwa secara individual variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika $|t_{hitung}| \leq t_{tabel}$ dan maka disimpulkan bahwa secara individual variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Untuk pengujian signifikansinya pada 0,05 ($\alpha=5\%$) dilakukan dengan kriteria dikutip dari (Silalahi Ulber, 2015: 559) adalah :

- a. Jika nilai signifikan $\text{sig} \leq 0,05$ maka hipotesis diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Sebaliknya Jika signifikan $\text{sig} \geq 0,05$ maka hipotesis ditolak artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau *joint* mempengaruhi variabel independen (Ghozali,2018;179). Patokan yang digunakan dalam pengujian ini adalah membandingkan nilai sig yang diperoleh dengan derajat signifikansi pada level $\alpha = 0,05$ untuk *degree of freedom* (df)= $n-k-1$. Uji ini dilakukan dengan kriteria dikutip dari (Silalahi Ulber,2015: 559) adalah:

- a. Jika nilai $|F_{hitung}| \geq F_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai $|F_{hitung}| \leq F_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Untuk pengujian signifikansinya pada 0,05 ($\alpha=5\%$) dilakukan dengan kriteria dikutip dari (Silalahi Ulber, 2015: 559) adalah :

- a. Jika nilai signifikan $\text{sig} \leq 0,05$ maka hipotesis artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Sebaliknya Jika signifikan $\text{sig} \geq 0,05$ maka hipotesis artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen.

3.6.5 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Menurut (Ghozali, 2011:223) Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel independen. Nilai R² kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, sebaliknya nilai R² yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Apabila teknik analisa datanya terdiri dari satu sampai dua variabel bebas kita menggunakan *R square*, tetapi apabila jumlah variabel bebasnya lebih dari dua variabel maka akan lebih baik menggunakan *adjusted R square* yang nilainya selalu lebih kecil dari *Rsquare*, (Ghozali, 2011:223). Dalam penelitian ini pengujian koefisien determinasi menggunakan *adjusted Rsquare*, karena variabel dalam penelitian ini lebih dari dua.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Penelitian ini mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Solok yang terdiri dari 26 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang kemudian diuji. Dalam mendapatkan responden maka dilakukan penyebaran kuesioner pada 26 Organisasi Pemerintah Daerah yang ada di Kabupaten Solok. Karakteristik responden dalam penelitian ini yaitu terdiri dari Kepala Dinas/Sekretaris, Kasubag Perencanaan/Keuangan dan Bendahara dimasing-masing OPD.

Tabel 4.1
Hasil Tabel *Respond Rate*

Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase (%)
Jumlah kuesioner yang disebar	88	100%
Jumlah kuesioner yang kembali	82	93%
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	6	7%
Kuesioner yang diolah (<i>Respond Rate</i>)	82	93%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021

Bedasarkan tabel 4.1 diatas dari 88 kuesioner penelitian yang disebar pada masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah penyebaran kuesioner sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 2.A(halaman 107) dan Lampiran 2.B(halaman 108), jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 82 kuesioner artinya penyebaran kuesioner mencapai 93%. Terdapat 6 kuesioner yang tidak kembali yaitu sebesar

7% dari tingkat pengembalian. Kuesioner yang tidak kembali dikarenakan responden yang bersangkutan tengah melaksanakan cuti atau sedang tidak berada ditempat. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi dari responden serta kaitannya dalam masalah dan tujuan penelitian tersebut. Uji Instrumen Data

4.1.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk melihat sejauh mana akurasi dari alat pengukur untuk mengukur apa yang diukur. Suatu alat ukur dapat dikatakan berhasil menjalankan fungsi ukurnya apabila dapat menunjukkan hasil ukurnya dengan cermat dan akurat. Untuk melihat validasi dari masing-masing item kuesioner dapat dilihat dengan pengujian validitas instrumen menggunakan metode *Pearson Correlation*, nilai validitas dapat dilihat pada kolom rhitung dengan rtabel. Dalam uji validitas dilakukan perbandingan nilai rhitung dengan rtabel.

Dengan membandingkan rhitung dengan signifikan 0,05 atau 5% untuk *degree of freedom (df) = n - 2*, dimana n adalah jumlah responden penelitian sebanyak 82 responden, diperoleh nilai *degree of freedom (df) = 82 - 2 = 80*, sehingga nilai rtabel sebesar 0,217. Jika rhitung > rtabel maka pertanyaan tersebut valid, dan sebaliknya jika rhitung < rtabel maka pernyataan tersebut tidak valid.

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1)

No	Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
1	X1.1	0,789	0,217	Valid
2	X1.2	0,816	0,217	Valid
3	X1.3	0,770	0,217	Valid
4	X1.4	0,771	0,217	Valid
5	X1.5	0,685	0,217	Valid
6	X1.6	0,795	0,217	Valid
7	X1.7	0,743	0,217	Valid
8	X1.8	0,754	0,217	Valid

Sumber : Pengolahan data statistic SPSS versi 23.0 (2021)

Dalam uji validitas diatas dilakukan perbandingan nilai rhitung dengan rtabel dengan signifikan 0,05 atau 5% untuk *degree of freedom (df) = n - 2*, dimana n adalah jumlah responden penelitian sebanyak 82 responden, diperoleh nilai *degree of freedom (df) = 82 - 2 = 80*, sehingga didapat nilai rtabel sebesar 0,217. Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat disimpulkan bahwa dimana rhitung masing-masing item pertanyaan lebih besar dari padartabel. Dalam uji ini membuktikan bahwa data tersebut valid dan dapat dianalisis lebih lanjut.

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal (X2)

No	Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
1	X2.1	0,748	0,217	Valid
2	X2.2	0,676	0,217	Valid
3	X2.3	0,785	0,217	Valid
4	X2.4	0,681	0,217	Valid
5	X2.5	0,748	0,217	Valid
6	X2.6	0,769	0,217	Valid
7	X2.7	0,726	0,217	Valid
8	X2.8	0,823	0,217	Valid
9	X2.9	0,761	0,217	Valid
10	X2.10	0,853	0,217	Valid

Sumber : Pengolahan data statistic SPSS versi 23.0 (2021)

Dalam uji validitas diatas dilakukan perbandingan nilai rhitung dengan rtabel dengan signifikan 0,05 atau 5% untuk *degree of freedom(df) = n-2*, dimana n adalah jumlah responden penelitian sebanyak 82 responden, diperoleh nilai *degree of freedom(df) = 82-2= 80*, sehingga didapat nilai rtabel sebesar 0,217. Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat disimpulkan bahwa dimana rhitung masing-masing item pertanyaan lebih besar dari rtabel. Dalam uji ini membuktikan bahwa data tersebut valid dan dapat dianalisis lebih lanjut.

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Sistem Pelaporan (X3)

No	Pertanyaan	R hitung	Rtabel	Keterangan
1	X3.1	0,773	0,217	Valid
2	X3.2	0,792	0,217	Valid
3	X3.3	0,735	0,217	Valid
4	X3.4	0,773	0,217	Valid
5	X3.5	0,854	0,217	Valid

Sumber : Pengolahan data statistic SPSS versi 23.0 (2021)

Dalam uji validitas diatas dilakukan perbandingan nilai rhitung dengan rtabel dengan signifikan 0,05 atau 5% untuk *degree of freedom(df) = n-2*, dimana n adalah jumlah responden penelitian sebanyak 82 responden, diperoleh nilai *degree of freedom(df) = 82-2= 80*, sehingga didapat nilai rtabel sebesar 0,217. Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat disimpulkan bahwa dimana rhitung masing-masing item pertanyaan lebih besar dari rtabel. Dalam uji ini membuktikan bahwa data tersebut valid dan dapat dianalisis lebih lanjut.

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

No	Pertanyaan	R hitung	Rtabel	Keterangan
1	Y.1	0,848	0,217	Valid
2	Y.2	0,849	0,217	Valid
3	Y.3	0,792	0,217	Valid
4	Y.4	0,811	0,217	Valid
5	Y.5	0,831	0,217	Valid
6	Y.6	0,869	0,217	Valid
7	Y.7	0,867	0,217	Valid
8	Y.8	0,748	0,217	Valid
9	Y.9	0,776	0,217	Valid
10	Y.10	0,576	0,217	Valid

Sumber : Pengolahan data statistic SPSS versi 23.0 (2021)

Dalam uji validitas diatas dilakukan perbandingan nilai rhitung dengan rtabel dengan signifikan 0,05 atau 5% untuk *degree of freedom(df) = n-2*, dimana n adalah jumlah responden penelitian sebanyak 82 responden, diperoleh nilai *degree of freedom(df) = 82-2= 80*, sehingga didapat nilai rtabel sebesar 0,217. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut valid, dan sebaliknya jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut tidak valid Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat disimpulkan bahwa dimana rhitung masing-masing item pertanyaan lebih besar dari rtabel. Dalam uji ini didapatkan membuktikan bahwa data tersebut valid dan dapat dianalisis lebih lanjut.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama pula. Untuk uji reliabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan, maka akan semakin baik. Keandalan konsistensi antar item atau koefisien dapat dilihat pada tabel *Cronbach's Alpha*. untuk menguji reliabilitas instrument, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Nilai reabilitas dinyatakan *reliable* jika mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing instrumen yang dikatakan valid jika $r_{hitung} > 0,6$.

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Standarisasi	N of Items	Keterangan
1	(X1)	0,899	0,60	8	Reliabel
2	(X2)	0,916	0,60	10	Reliabel

3	(X3)	0,845	0,60	5	Reliabel
4	(Y)	0,937	0,60	10	Reliabel

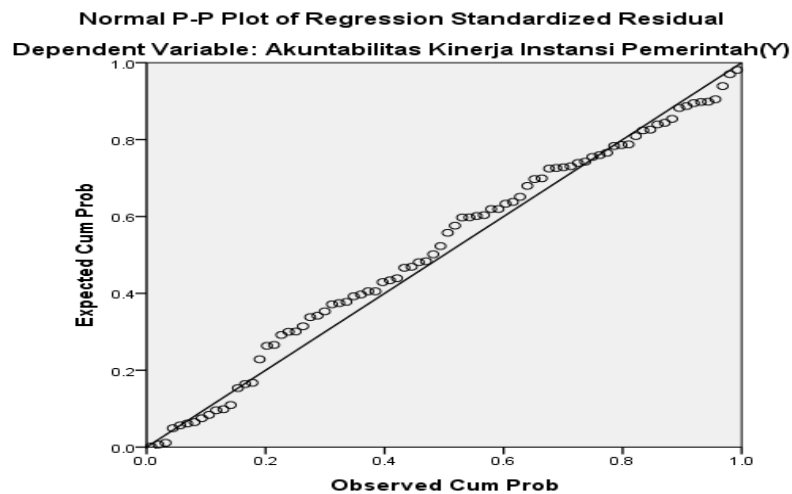
sumber : Pengolahan data statistic SPSS versi 23.0 (2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa keempat variabel tersebut memiliki item pertanyaan dapat dikatakan reliabel karena hasil pengujian data menunjukkan *Cronbach Alpha* variabel Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1) $0,899 > 0,60$, Sistem Pengendalian Internal (X2) $0,916 > 0,60$, Sistem Pelaporan (X3) $0,845 > 0,60$ Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) $0,937 > 0,60$ dengan tingkat keterandalan yang tinggi.

4.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi residual dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Untuk mendeteksi apakah residual yang digunakan tersebut berdistribusi normal maka dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dan grafik. Jika data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas secara grafik *Probability Plot* dengan menggunakan SPSS versi 23.0 ditunjukkan dengan grafik dibawah ini:



Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas

Sumber : Pengolahan data statistic SPSS versi 23.0 (2021)

Berdasarkan gambar 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal dan tidak membentuk garis lain. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2) dan Sistem Pelaporan (X3) menyebar dan mengikuti arah garis diagonal. Sehingga data variable indenpenden memenuhi uji normalitas dan penelitian ini dapat diteliti lebih lanjut.

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji asumsi multikolinearitas ini dimaksudkan untuk membuktikan atau menguji ada tidaknya hubungan linear antara variabel bebas (*independent*) satu dengan variabel bebas (*independent*) yang lainnya. Dalam analisis regresi ganda, maka akan terdapat dua atau lebih variabel bebas yang diduga akan mempengaruhi variabel terikatnya (*dependent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel *independent*. Dasar pengambilan keputusan adalah apabila nilai *tolerance* > 0,1 atau sama dengan nilai *VIF* < 10 berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi. Hasil perhitungan *VIF* untuk pengujian multikolinearitas antara sesama variabel bebas dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut :

Tabel 4.10
Hasil Uji Multikolonearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Sistem akuntansi pemerintah daerah (X1)	0,312	3,200
Sistem pengendalian internal (X2)	0,273	3,670
Sistem pelaporan (X3)	0,335	2,982

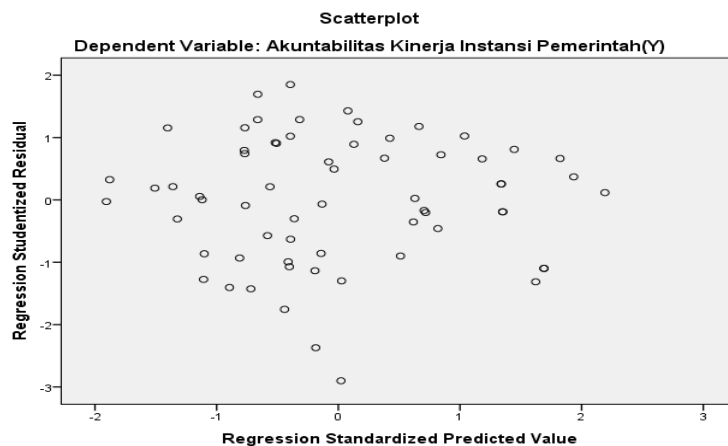
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(Y)

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021

Dari tabel 4.10 diatas hasil output pada uji multikolinearitas di dapatkan nilai *tolerance* untuk masing-masing variabel > 0,1 dan nilai *VIF* untuk masing-masing variabel < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi. Sehingga penelitian ini dapat untuk diteliti lebih lanjut.

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan kepengamatan lain. Model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Pendeteksian mengenai ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pole tertentu pada grafik *scatterplot* antara *SRESID* dan *ZPRED* dimana sumbu Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual yang telah *standardized*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut :



Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Pengolahan data statistik SPSS versi 23.0 (2021)

Berdasarkan *scatterplot* diatas terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0(Nol) pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan dalam model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Sehingga penelitian ini dapat diteliti lebih lanjut.

4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan terhadap variabel terikat yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 4.11
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	6,156	1,567	
Sistem akuntansi pemerintah daerah (x1)	0,490	0,094	0,434
Sistem pengendalian internal (x2)	0,271	0,078	0,309
Sistem pelaporan (x3)	0,439	0,148	0,239

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(Y)

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.11di atas, persamaan regresi linier berganda dapat disusun sebagai berikut.

$$Y = 6,156 + 0,490X_1 + 0,271X_2 + 0,439X_3$$

Perubahan ini merupakan pertambahan bila b bertanda positif dan penurunan b bila bertanda negatif. Sehingga dari persamaan di atas dapat di jelaskan bahwa:

- a. Nilai konstanta sebesar 6,156, hal ini menunjukkan apabila variabel Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan jika dianggap konstan (0), maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebesar 6,156 satuan.
- b. Koefisien Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebesar 0,490. Hal ini berarti setiap kenaikan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebesar 1 satuan akan menaikkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,490satuan dengan asumsi variabel X2, X3 bernilai konstan atau nol (0).
- c. Koefisien Sistem Pengendalian Internal sebesar 0,271. Hal ini berarti setiap kenaikan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebesar 1 satuan akan menaikkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,271satuan dengan asumsi variabel X1, X3 bernilai konstan atau nol (0).
- d. Koefisien Sistem Pengendalian Internal sebesar 0,439. Hal ini berarti setiap kenaikan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebesar 1 satuan akan menaikkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,439 satuan dengan asumsi variabel X2, X3 bernilai konstan atau nol (0).

4.4 Uji Hipotesis

4.4.1 Pengujian Secara Parsial (t-test)

Uji t (*t-test*) merupakan statistik uji yang seringkali ditemui dalam masalah praktis statistik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan taraf signifikansi 5% untuk *degree of freedom* (df)= jumlah sampel (n) -jumlah variabel yang diteliti (k), dimana n merupakan jumlah data pengamatan dan k adalah jumlah variabel bebas.

Tabel 4.12
Hasil Uji t
Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,156	1,567		3,929	0,000
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1)	0,490	0,094	0,434	5,210	0,000
Sistem Pengendalian Internal (X2)	0,271	0,078	0,309	3,467	0,001
Sistem Pelaporan (X3)	0,439	0,148	0,239	2,967	0,004

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(Y)

Sumber : Pengolahan data statistic SPSS versi 23.0 (2021)

Nilai ttabel dengan jumlah data 82 dan $\alpha = 5\%$, $df = 82 - 3 = 79$ sebesar 1,664. Dari hasil pengujian diatas, didapat nilai thitung sebagai berikut :

1. Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dan ttabel. Hipotesis diterima jika $thitung > ttabel$ dan nilai $sig < \alpha 0,05$. Nilai ttabel pada $\alpha = 0,05$ adalah 1,664. Untuk variabel independen yaitu Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah nilai thitung adalah 5,210 dan nilai sig 0,000 dengan demikian dapat di katakan bahwa thitung lebih besar dari ttabel yakni $5,210 > 1,664$ dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Sehingga Hipotesis Pertama (H1) diterima bahwa variabel Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dan ttabel. Hipotesis diterima jika $thitung > ttabel$ dan nilai $sig < \alpha 0,05$. Nilai ttabel pada $\alpha = 0,05$ adalah 1,664. Untuk variabel independen yaitu Sistem Pengendalian Internal nilai thitung adalah 3,467 dengan dan nilai sig 0,001 dengan demikian dapat di katakan bahwa thitung lebih besar dari ttabel yakni $3,467 > 1,664$ dengan signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Sehingga Hipotesis Kedua (H2) diterima bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Pengujian hipotesis 3

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dan ttabel. Hipotesis diterima jika $thitung > ttabel$ dan nilai $sig \alpha < 0,05$. Nilai ttabel pada $\alpha = 0,05$ adalah 1,664. Untuk variabel independen yaitu Sistem Pelaporan nilai thitung adalah 2,967 dengan dan nilai sig 0,004 dengan demikian dapat di katakan bahwa thitung lebih besar dari ttabel yakni $2,967 > 1,664$ dengan signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Sehingga Hipotesis Ketiga (H3) diterima dan dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4.4.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh terhadap variabel tidak bebas. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Hasil uji F dilihat pada tabel ANOVA dalam kolom sig.

Hasil uji F juga dapat dilihat dengan cara membandingkan antara f_{hitung} dengan f_{tabel} , jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka dapat dikatakan berpengaruh signifikan secara bersama-sama, namun jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka tidak ada pengaruh secara bersama-sama. Hasil perhitungan uji F dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut.

Tabel 4.13
Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2678,773	3	892,924	127,681	.000 ^b
Residual	545,483	78	6,993		
Total	3224,256	81			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(Y)

b. Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan (X3), Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2)

Sumber : Pengolahan data statistic SPSS versi 23.0 (2021)

Berdasarkan tabel 4.13 diatas dapat dilihat hasil uji F diperoleh nilai Fhitung $127,681 > F_{tabel} 2,72$ atau nilai signifikan $0,000 < 0,05$, sehingga variabel Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), dan Sistem Pelaporan (X3) secara bersama-sama atau secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Jadi hipotesis yang dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian atau hipotesis diterima.

4.5 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi antara tiga variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai determinasi ditentukan dengan nilai Adjust R Square yang digunakan untuk regresi dengan variabel lebih dari dua variabel sebagai koefisien determinan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut :

Tabel 4.14
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,911 ^a	0,831	0,824	2,64450

a. Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan (X3), Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2)

Sumber : Pengolahan data statistic SPSS versi 23.0 (2021)

Dari hasil analisis regresi linier berganda tersebut dapat terlihat bahwa nilai determinasi atau *Adjusted R Square* sebesar 0,824 yang menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dipengaruhi variabel Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan sebesar 82,4% sisanya yaitu 17,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam

penelitian ini. Seperti penelitian Kejelasan Sasaran Anggaran (Kahar et al., 2017), Ketaatan Peraturan Perundangan (Lumenta et al., 2016) dan Pengendalian Akutansi (Fitriana et al., 2018).

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

4.6.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Hipotesis pertama menyatakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil perhitungan secara statistik untuk variabel Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah didapatkan nilai $t_{hitung} 5,210 > t_{tabel} 1,664$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga Hipotesis Nol ditolak dan Hipotesis Pertama (H1) diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel sistem akuntansi pemerintah daerah (X1) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Artinya, jika penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah tersebut berjalan dengan baik, maka akan berdampak pada nilai kinerja daerah yang dituangkan dalam nilai LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Hal ini disebabkan karena tujuan penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah untuk mewujudkan fungsi analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah yang laporan keuangan itu pada akhirnya dapat menjadi suatu informasi untuk mengukur dan menilai kinerja pemerintah dalam rangka menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan kerjanya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh (Afrina, 2015; Zulharman, 2015) pada SKPD Kota Pekanbaru, (Riani, 2015) di SKPD Kabupaten Agam, dan penelitian yang di lakukan (Aprianti, 2017) di SKPD Kabupaten Bandung Barat.

4.6.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Hipotesis kedua (H2) menyatakan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil perhitungan secara statistik untuk sistem pengendalian internal mempunyai nilai $t_{hitung} 3,467 > t_{tabel} 1,664$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Sehingga Hipotesis Nol ditolak dan Hipotesis Kedua (H2) diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal secara signifikan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil penelitian membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Internal dapat mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Artinya, dengan adanya Sistem Pengendalian Internal didalam suatu pemerintahan, maka akan mempermudah pelaksanaan terhadap evaluasi dan tindak lanjut dari proses kegiatan yang ada khususnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini dikarenakan Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan bukanlah maksud untuk menghilangkan semua kemungkinan kesalahan atau penyimpangan, akan tetapi Sistem Pengendalian Internal yang efektif akan menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam menjalankan aktivitas organisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah di lakukan oleh (Kahar et al., 2017) pada SKPD Kabupaten Parigi Moutong, (Kadek et al., 2014) di SKPD Kabupaten Klungkung, dan penelitian oleh (Fitriyani & Herawati. Helmi, 2014) Dinas Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah.

4.6.3 Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil perhitungan secara statistik untuk sistem pelaporan mempunyai nilai $t_{hitung} 2,967 > t_{tabel} 1,664$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,004 < 0,05$. Sehingga Hipotesis Nol ditolak dan Hipotesis Ketiga (H3) diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel sistem pelaporan secara signifikan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Artinya, dengan adanya penyusunan sistem pelaporan yang baik akan dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Solok. Hal itu disebabkan karena dengan adanya sistem pelaporan yang baik akan menciptakan pengelolaan yang transparan dan akuntabel sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin baik. Jadi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perlu dilakukan pelaporan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan terkait dengan pelaporan anggaran.

Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian terdahulu yang telah di lakukan oleh (Fauzan, 2017) pada SKPD Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat, (Fathia, 2017) di SKPD Provinsi Riau, dan (Riani, 2015) SKPD Kabupaten Agam.

4.6.4 Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hasil uji F diperoleh nilai $F_{hitung} 127,681 > 2,72$ atau nilai signifikan $0,000 < 0,05$, sehingga variabel Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1), Sistem Pengendalian Internal

(X2) dan Sistem Pelaporan (X3) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Jadi hipotesis yang dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian dan diterima. Hal ini Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2) dan Sistem Pelaporan (X3) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

Variabel Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan faktor atau unsur didalam keberhasilan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan adanya penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan maka akan memudahkan didalam membuat laporan yang di tuangkan dalam nilai LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

5.PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah, sistem pengendalian internal, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Solok, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari peneliti sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Solok. Artinya, jika penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah tersebut berjalan dengan baik, maka akan berdampak pada nilai kinerja daerah yang dituangkan dalam nilai LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Solok. Artinya, dengan adanya Sistem Pengendalian Internal didalam suatu pemerintahan, maka akan mempermudah pelaksanaan terhadap evaluasi dan tindak lanjut dari proses kegiatan yang ada khususnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Artinya, dengan adanya penyusunan sistem pelaporan yang baik akan dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Solok. Hal itu disebabkan karena dengan adanya sistem pelaporan yang baik akan menciptakan pengelolaan yang transparan dan akuntabel sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin baik. Jadi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perlu dilakukan pelaporan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan terkait dengan pelaporan anggaran.

4. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5.2 Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu :

1. Berdasarkan hasil analisis yang telah di uraikan Bagi pemerintahan Kabupaten Solok agar meningkatkankualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah serta meningkatkan kualitas Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar bisa memperluas ruang lingkup penelitian dan penambahan responden yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja dan dikarenakan masih terdapat banyak faktor-faktor lain yang berpengaruh di luar model penelitian, diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, D. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (*Studi Persepsian Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru*). *Jom FEKON Universitas Riau.*, Vol 2(No 2).
- Agustin, K. (2018). Pengaruh Kejelasan Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Ketaatan Peraturan Perundangang Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta). *Universitas Islam Indonesia*.
- Anjarwati. (2012). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal*, Vol 3(No 1), 1–7. <https://doi.org/10.15294/aaj.v1i2.555>
- Aprianti, R. (2017). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. (Survei pada 27 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung Barat)* (hal. 1–17). Jurnal Online Universitas Komputer Indonesia.
- Arikunto, S. (2010). Metode Peneltian. In *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Suatu Pengantar Edisi Ketiga Jakarta: Erlangga.
- Fathia, N. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). (*Study Kasus SKPD di Provinsi Riau*), 4(1), 670–685.
- Fauzan, R. H. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi,

- Sistem Pelaporan Dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip). (*Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat*) Universitas Riau, Vol. 4(No. 1).
- Fitriana, R. D., Hidayati, N., & Mawardi, M. C. (2018). Pengaruh Kejelasan Sasaran anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang*, Vol 7(No 2).
- Fitriyani, N., & Herawati. Helmi. (2014). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (*Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah*), Vol 1(No 17), 19–35.
- Ghozali, I. (2011). “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*” Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, L. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. In *Jakarta: Salemba Empat*.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2012). Akuntansi Sektor Publik: teori, konsep dan aplikasi. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Hall, J. (2011). *Accounting Information System*. Edisi Satu, Salemba Empat.
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2016). *Akuntansi Pemerintah* (I. MEDIA (ed.)).
- Hidayatullah, A. (2013). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD Di Merauke. *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank*.
- IAPI. (2011). *Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)*. Edisi Mei 2009. Penerbit ikatan Akuntan public Indonesia, Jakarta.
- Kadek, N., Primayoni, R., Adiputra, I. M. P., & Sujana, E. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (*Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Klungkung*) *Jurnal Online Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 2(No 1).
- Kahar, A., Fitrawati, & Iqbal A, M. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (*Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Parigi Moutong*), Vol 5(No 12), 177–184.
- Krismiaji. (2010). *Sistem Informasi Akuntansi*. edisi ketiga. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu YKPN.
- Kumaat, V. G. (2011). *Internal Audit*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Lukito, P. K. (2014). *Membumikan transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor publik: Tantangan berdemokrasi ke depan*. Grasindo (PT Gramedia Widiasarana Indonesia) Jakarta.

- Lumenta, A. L., Morasa, J., & Mawikere, L. (2016). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal EMBA, Vol 4*(No 2), 768–779.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi*. Edisi Keempat. Cetakan Keempat. Jakarta. Salemba Empat.
- Permadi, A. D. (2013). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah daerah terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah*.
- Pratama, R., Agustin, H., & Taqwa, S. (2019). *Pengaruh pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*. *1*(1), 429–444.
- Priyatno, D. (2010). *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendarasan*. Yogyakarta: BPFU UGM.
- Putro, E. W. (2013). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*.
- Rasdianto, E. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*.
- Riani, I. (2015). Pengaruh Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Online Universitas Riau, 2*(2).
- Setiawan, E. K. O. (2013). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. *Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 1–14*.
- Soleman, R., Soleman, R., & Zainuddin. (2019). Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kualitas Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Online Universitas Khairun., Vol 3*(No 1).
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung:Alfabeta (ed.)).
- Syahrir, M. (2019). Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP). *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP), Vol 4*(No 2), 20–37.
- Wiyono, G. (2011). *Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & Smart PLS 2.0*. Yogyakarta: Percetakan STIM YKPM.
- Zulharman, K. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru) Jom FEKON Universitas Riau, Vol 2*(No 2).



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juita Surkraini, SE.M. Si
NIDN : 1017116201
Pangkat/Golongan : Penata Tk I/ III d
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul: **Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah**, yang dilaksanakan tahun akademik 2020/2021 bersifat **original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/ sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Solok, 23 Februari 2021

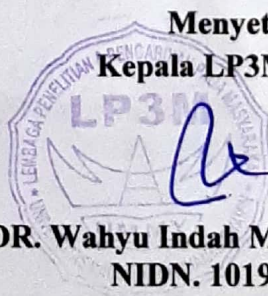


Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

(Juita Surkraini, SE.M. Si)
NIDN. 1017116201

Ketua,

(Juita Surkraini, SE.M. Si)
NIDN. 1017116201



Menyetujui,

Kepala LP3M UMMY

(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM)
NIDN. 1019017402